

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan penelitian dapat dikatakan bahwa pola gerakan kelompok separatis Papua dalam konflik Papua masuk dalam kategori ancaman *hybrid warfare* yang mengganggu kedaulatan pertahanan negara. Pola-pola ancaman *hybrid warfare* ini mengganggu kedaulatan pertahanan negara ditunjukkan berdasarkan respon dunia internasional dalam mendorong internasionalisasi Papua, dibuktikan dengan aktivitas dukungan, empati, dan demonstrasi tanpa kekerasan di Kedutaan Besar Indonesia di negara lain. Selain itu, aktivitas negara Melanesian (Vanuatu, Fiji, dan Papua New Guinea) dalam membantu mengganggu negara. Hal ini dibuktikan dengan serangan di forum PBB dan hilangnya komitmen menjaga perbatasan disekitar Papua. Dukungan organisasi seperti ULMWP yang konsisten dalam menjaga upaya kemerdekaan Papua, ditandai dengan jaringan diplomasi dengan negara lain, pertemuan dengan parlemen di Uni Eropa, dan pernyataan provokatif seputar Papua.

Ancaman *hybrid warfare* pun berasal dari aktivitas propaganda aktor non-negara, yang dibuktikan dengan konsistensi dalam memanfaatkan media sosial untuk mempropagandakan isu seputar Papua yang dilakukan oleh akun anonim dan aktor individu. Propaganda aktor individu (Benny Wenda) dapat menjadi pelopor ancaman hibrida, ditandai dengan unggahan provokatif dan offensive yang berhubungan dengan visualisasi identitas Papua, kekerasan yang menimpa masyarakat Papua, dan jaringan internasional. Selain itu, aktivitas Veronica Koman pun dapat membawa menuju ancaman hibrida, ditandai dengan unggahan propaganda dengan mengabaikan validitas informasi, menyebarkan kekerasan di Papua, dan tampil di media Australia.

Pasang surut konflik di Papua menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani konflik di Papua. Situasi ini membawa konflik Papua semakin dekat dengan ancaman hibrida, penyebabnya adu pengaruh antar kelompok separatis OPM dan TNI dalam menjaga kepercayaan Papua, selama

konflik Papua ini semakin berlarut potensi kehilangan kepercayaan semakin besar karena negara dianggap gagal memberikan perlindungan.

Konflik bersenjata yang terjadi di Papua (terbuka, gerilya, dan penyanderaan) akan membawa konflik Papua masuk dalam kategori ancaman hibrida, hal tersebut dapat terjadi akibat pengemasan informasi yang menyudutkan TNI dan mengundang perhatian komoditas nasional dan internasional. Selain itu, penyebaran disinformasi terkait Papua dapat menjadi tanda ancaman hibrida karena informasi yang diterima dapat menyebabkan ambiguitas antar informasi valid dan palsu, sehingga berita palsu pun dapat diterima masyarakat.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas konflik yang terjadi di Papua menunjukkan ancaman yang nyata, bukan lagi menjadi sebatas ancaman potensial sekaligus masuk dalam ancaman pertahanan aktor yang mengganggu negara menginginkan kemerdekaan bukan sekadar tuntutan. Hasil dari kompleksivitas konflik Papua sewaktu-waktu dapat naik dan menyebar berpotensi terhadap ancaman hibrida dengan tujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembahasan dan temuan penelitian ini diperkuat dengan pernyataan Fridman bahwa ancaman gerakan sparatis Papua yang terjadi dalam konflik Papua pola-pola serangannya memenuhi unsur-unsur operasi *hybrid warfare*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka diperoleh saran antara lain sebagai berikut:

1. Untuk keilmuan Ilmu Politik, penelitian ini dapat menjadi awal untuk menganalisis sejauh mana konflik di Papua dengan berbagai macam pola dan kompleksivitas dapat membawa menuju ancaman hibrida. Untuk itu diperlukan kekhususan teori-teori *hybrid warfare* untuk menganalisis permasalahan-permasalahan terhadap ancaman pertahanan. Teori-teori *hybrid warfare* dalam kajian ini dapat memperkaya pemahaman pemikiran dalam mata kuliah politik pertahanan maupun implikasinya.
2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRI RI) harus segera menyusun kepastian hukum dan penjelasan rinci terkait ancaman hibrida.

Hal ini penting untuk menentukan batasan operasional gangguan gejala di Papua untuk disebut sebagai ancaman hibrida, kemudian kriteria ancaman, dan pihak yang dapat menentukan identifikasi ancaman.

3. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan yang membawahi Tentara Nasional Indonesia beserta K/L terkait harus saling berbagi peran dan menyelesaikan panduan, mendefinisikan, tupoksi, fungsi, dan doktrin untuk menghadapi ancaman hibrida.
4. Menyarankan untuk akademisi memberikan perhatian lebih terhadap konflik di Papua, terutama perihal ancaman hibrida yang menjadi ancaman nyata. Hal ini menjadi penting sebab dengan eskalasi yang terus menerus dan semakin besar bukan tidak mungkin konflik di Papua dapat mendorong pihak ketiga untuk ikut campur terkait kedaulatan negara.